

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Vanuatu adalah salah satu negara kepulauan yang terletak di kawasan Pasifik bagian barat daya dan masuk ke dalam kawasan Melanesia. Ber-ibukota di Port Vila, yang juga merupakan kota terbesar dan pusat kegiatan bisnis (Forster & Adams, 2020), Vanuatu memiliki luas daratan sekitar 12.190 km<sup>2</sup>, dan populasi sekitar 309.654 jiwa (Population of Vanuatu, 2020). Dalam bahasa Melanesia, '*vanuatu*' berarti "tanah kita selamanya".

Pada mulanya Vanuatu bernama New Hebrides, yang merupakan bekas jajahan yang dikelola bersama oleh koloni Inggris dan Perancis. (Cummings, 2013). Upaya New Hebrides dalam meraih kemerdekaan mulai membuahkan hasil ketika keinginannya disetujui pada konferensi bersama di Paris tahun 1977, yang dihadiri oleh perwakilan Inggris, Perancis & New Hebrides. Dua tahun kemudian, pada 1979, diadakan pemilu nasional serentak untuk memilih wakil rakyat dari Parlemen New Hebrides, di mana Partai Vanua'aku Pati (VP) keluar sebagai pemenang untuk menjadi pemimpin New Hebrides. New Hebrides akhirnya merdeka dengan nama yang baru yakni Republik Vanuatu, pada 30 Juli 1980 (Forster & Adams, 2020).

Vanuatu pertama kali dipimpin oleh Walter Lini. Beliau merupakan ketua dari partai Vanua'aku Pati (VP) yang berhasil memenangkan pemilu nasional pada tahun 1979, dan menjadi Perdana Menteri pertama Vanuatu. Disisi lain, beliau sebelumnya juga dikenal sebagai seorang pastor Anglikan, yang menempuh pendidikannya di sekolah denominasi Kristen di Vanuatu dan seminari teologi di Kepulauan Solomon dan Selandia Baru. Walter Lini-lah yang menemukan istilah Sosialisme Melanesia, dan menjadikannya sebuah ideologi yang dipakai oleh partai Vanua'aku Pati. (Premdas, 1987)

Vanua'aku Pati yang berlandaskan pada Sosialisme Melanesia dalam prakteknya berfokus pada nasionalisme, kedaulatan bangsa dan mempertahankan kultur tradisional bangsa. Sosialisme Melanesia sendiri bersumber dari nilai-nilai asli Melanesia, atau yang disebut *kastom*. Selain dari *kastom*, Sosialisme Melanesia juga dipengaruhi tiga sumber eksternal, yakni Kristenitas, *Tanzanian Connection*, dan *Melanesian Way*. (Premdas, 1987)

Kristenitas menjadi satu dari tiga dasar yang mempengaruhi Sosialisme Melanesia karena Walter Lini sendiri merupakan seorang Pastor Anglikan. Selain Walter Lini, rekan-rekan pendiri dan aktivis Vanua'aku Pati juga merupakan lulusan sekolah-sekolah Kristen. Oleh karena itu, bukanlah suatu kebetulan jika begitu banyak fitur doktrinal Sosialisme Melanesia yang mirip dengan prinsip dasar agama Kristen. Menurut Walter Lini, dalam bentuk idealnya, nilai-nilai Kristen memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai Melanesia. Beliau juga memandang Kristenitas sebagai paham yang bersifat sosialis, sama dengan budaya-budaya Melanesia. (Premdas, 1987)

Yang kedua adalah *Tanzanian Connection*. Maksud dari *Tanzanian Connection* disini adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh beberapa ni-Vanuatu yang bersekolah hukum di Universitas Papua Nugini yang menjadi sarang bagi radikal anti-kolonial di daerah Pasifik. Universitas tersebut merupakan kontingen yang berpengaruh dengan dosen ekspatriat yang punya pengalaman di Tanzania dan simpati terhadap Julius Nyerere, seorang sosialis populis di Tanzania. Setelah kemerdekaan PNG, para ni-Vanuatu tersebut kembali ke Vanuatu untuk membantu nasionalis Vanuatu dalam hal konstitusional dan politik. Kemudian, seperti Tanzania dan PNG, Vanuatu mengumumkan kode kepemimpinan yang sangat mirip dengan Deklarasi Arusha, dan model pengambilan kebijakan yang lebih banyak melibatkan rakyat. Selanjutnya juga hal ini sangat mempengaruhi orientasi kebijakan luar negeri Vanuatu yang berupa gerakan non-blok. (Premdas, 1987)

*Melanesian Way* menjadi sumber terakhir dari Sosialisme Melanesia. *Melanesian Way* sendiri adalah sebuah konsep yang bertujuan menyatukan seluruh komunitas Melanesia

yang heterogen secara budaya dan linguistik. Konsep ini mengadvokasi identitas dan solidaritas orang Melanesia, bukan negara Melanesia. Konsep ini tetap mengenal batas negara, namun warga negara Melanesia disatukan oleh sebuah persamaan, yakni mereka sebagai orang Melanesia. Melanesian Way merupakan reaksi terhadap kolonialisme dan alat yang penting dalam dekolonisasi intelektual, pembangunan negara, dan solidaritas regional. Konsep ini dipopulerkan oleh Bernard Narokobi, salah satu pemimpin Papua New Guinea (PNG) yang terkenal. Paham Melanesian Way naik ke permukaan ketika PNG sedang mempersiapkan kemerdekaannya pada tahun 1970 (Alailima, 1994).

Lebih lanjut, nilai-nilai dari Melanesian Way dituangkan ke dalam bentuk “*Agreed Principles of Co-operation among Independent States of Melanesia*” yang ditandatangani oleh Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Republik Vanuatu, di Port Vila, pada 14 Maret 1988. Di saat yang sama, *Agreed Principles* tadi menjadi titik awal terbentuknya Melanesian Spearhead Group (MSG). MSG sendiri adalah *International Government Organization* (IGO) yang beranggotakan negara-negara yang memiliki latar belakang budaya Melanesia, dan sama-sama meyakini Melanesian Way (kemlu.go.id, 2019).

Sosialisme Melanesia yang digagas oleh Vanua’aku Pati ini pada akhirnya menjadi kompas Vanuatu dalam menentukan kepentingan nasionalnya, yang pada akhirnya sangat memihak orang-orang Melanesia. Dari Sosialisme Melanesia ini, lahirlah kebijakan luar negeri berupa advokasi untuk dekolonisasi bangsa Melanesia yang belum merdeka. Kebijakan tersebut bisa lahir, karena Sosialisme Melanesia adalah suatu paham yang menekankan pada komunalisme, *sharing* dan humanisme, serta mengedepankan kepentingan golongan atau kelompok, yang dalam hal ini adalah orang-orang Melanesia. (Temaluru, 2016)

Di Indonesia, ada beberapa kawasan atau provinsi yang didiami oleh orang-orang Melanesia, seperti Maluku dan Papua. Dalam pandangan Vanuatu, Indonesia telah memperlakukan warga Papua secara tidak baik. Berawal dari tahun 1969, keberpihakan dan dukungan Vanuatu pada Papua Barat dimulai ketika digelarnya Penentuan Pendapat Rakyat

(Pepera) atau Act of Free Choice. Hasil dari Pepera menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Papua Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Namun, Vanuatu meyakini, pihak Indonesia telah berlaku tidak adil dalam pelaksanaan Pepera tersebut (Mardiyah, 2020). Vanuatu menilai bahwa Perjanjian New York dan Pepera 1969 “cacat hukum” dan melanggar hak-hak asasi rakyat Papua karena tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yakni *one man one vote*, melainkan melalui sistem perwakilan (Sabir, 2018).

Berawal dari hal tersebut, Vanuatu mulai terus memantau keadaan yang terjadi di Papua Barat. Seiring waktu, dengan bermunculannya kasus-kasus baru mengenai HAM di Papua Barat, muncul reaksi berupa gerakan separatis oleh beberapa yang menginginkan Papua Barat berdiri sebagai negara sendiri karena ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia. (Nainggolan, 2014) Dari sisi Indonesia, pemerintahan pasca-Suharto, termasuk pemerintahan Jokowi, telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di seluruh bagian Indonesia. Meski secara jumlah masalah dalam beberapa tahun terakhir ini telah berkurang, masih terdapat beberapa perlakuan yang tidak adil terhadap warga Papua Barat. (Blades, 2020)

Berdasarkan hubungan antar etnis yang erat, dan keinginan untuk memerdekakan Papua Barat dari kolonialisme dan pelanggaran HAM, Vanuatu menjadi salah satu negara yang paling vokal dalam menyuarakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua Barat. (Sabir, 2018) Sebagai negara kecil yang kepentingan nasionalnya merupakan misi penegakan HAM, Vanuatu memiliki kesempatan besar untuk meraih dukungan secara luas guna memenuhi kepentingan nasionalnya.

Kepentingan nasional Vanuatu perihal dekolonisasi Melanesia tidak berubah semenjak kepemimpinan Walter Lini. Meskipun VP dan Walter Lini tidak lagi memegang kekuasaan di Vanuatu sejak tahun 1991, nilai-nilai Sosialisme Melanesia tersebut telah mendarah-daging dan memengaruhi kebijakan beberapa pemimpin Vanuatu selanjutnya

sepeninggal kepemimpinan Walter Lini. Sehingga, meski Vanuatu dikuasai oleh Partai dan Pemimpin yang memiliki ideologi yang berbeda dari VP & Walter Lini, misi Vanuatu dalam memerdekakan seluruh Melanesia akan terus berjalan, karena Sosialisme Melanesia yang integral bagi Vanuatu, dan “*Agreed Principles of Co-operation among Independent States of Melanesia*”.

Meski begitu, sikap rezim-rezim pemerintahan Vanuatu sendiri sebenarnya tidak selalu konsisten dalam hal menyuarakan dukungannya terhadap isu HAM yang terjadi Papua Barat. Pergantian pemimpin di Vanuatu dapat berarti pergantian kebijakan luar negeri pula. Hal ini dapat terjadi karena ada juga pemimpin yang memiliki pertimbangan tertentu dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, Sato Kilman (2015-2016) cenderung pasif di forum internasional dalam kaitannya dengan isu Papua Barat, karena adanya bantuan finansial dari Indonesia sebesar 450.000 US\$ untuk kerusakan besar yang terjadi di Vanuatu akibat *Cyclone Pam* pada tahun 2015. (Temaluru, 2016) Dukungan Vanuatu kembali bergema mulai dari kepemimpinan Charlot Salwai, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Vanuatu tahun 2016-2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut: ”Bagaimana upaya Vanuatu dalam mendukung kemerdekaan Papua Barat pada tahun 2016-2020?”

## **C. Kerangka Teori**

Penelitian ini menggunakan teori diplomasi multilateral untuk menjelaskan strategi Vanuatu dalam dukungannya terhadap kemerdekaan Papua Barat.

Diplomasi multilateral adalah proses diplomasi yang dilakukan oleh beberapa negara secara bersama-sama. Diplomasi multilateral memungkinkan setiap negara yang terlibat untuk berhubungan dan berdiplomasi. Dalam diplomasi multilateral, negara-negara yang berkonferensi membahas satu atau beberapa masalah besar yang sedang terjadi (Hartanto,

2016). Organisasi internasional seperti PBB, misalnya, menggunakan diplomasi multilateral sebagai sarana untuk mengambil keputusan atas suatu permasalahan yang membutuhkan kesepakatan dari pihak-pihak terkait. (Aslamiah, 2015).

Menurut Johan Kauffman, diplomasi multilateral berfungsi sebagai manajemen hubungan antar-pemerintah dan organisasi antar-pemerintah yang terjadi dalam konferensi internasional. Diplomasi multilateral bersifat kompleks; hal ini terlihat dari lamanya waktu persidangan, banyaknya pihak, beragamnya isu dan kepentingan, serta faktor-faktor lainnya yang terlibat dalam kegiatan yang bersangkutan. Hal yang sangat penting dalam sebuah diplomasi multilateral adalah bagaimana kesepakatan tersebut dapat dicapai di saat jumlah pihak yang terlibat dalam negosiasi dan isu yang dibahas tidak sedikit. Rumitnya persidangan di forum internasional disebabkan karena kompleksnya aturan dalam persidangan dan lamanya pembahasan mengingat beragamnya kepentingan dari setiap negara (Pujayanti, 2012).

Ronald A. Walker mengemukakan tentang tujuan-tujuan dari diplomasi multilateral seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut (Walker, 2004).

**Tabel 1.1 Tujuan Diplomasi Multilateral**

No.	Tujuan	Definisi
1.	Pengumpulan dan penyatuan informasi	Tujuan utama dari interaksi antar-pemerintah adalah untuk mempermudah dalam akses informasi. Melalui diplomasi multilateral proses penyebaran informasi akan semakin mudah untuk diperoleh.
2.	Proyek Bersama	Proyek bersama merupakan salah satu langkah yang efektif bagi negara untuk mencapai tujuan bersama
3.	Mengelola lingkungan eksternal	Diplomasi multilateral bisa mempengaruhi lingkungan regional dan global karena akan membuat lingkungan menjadi lebih kondusif

4.	Mempengaruhi perilaku	Negara dengan kedaulatan yang dimilikinya memiliki kemampuan untuk membuat suatu kebijakan sendiri. Melalui diplomasi multilateral adanya upaya bagi suatu negara untuk mempengaruhi kebijakan negara lain
5.	Kesepakatan yang saling menguntungkan	Tujuan selanjutnya adalah adanya manfaat bersama bagi negara atau pihak yang melakukan diplomasi multilateral. Artinya, manfaat tidak hanya diperoleh oleh suatu pihak saja, akan tetapi ada pihak lain yang juga memperoleh manfaat dari kesepakatan yang dilakukan.
6.	Agenda Domestik	Agenda domestik merupakan salah satu alasan dan tujuan bagi negara untuk melakukan diplomasi multilateral, karena hubungan internasional tidak terlepas dari situasi dan agenda domestik, begitu juga sebaliknya.

Menurut Ronald A. Walker terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam melakukan diplomasi multilateral bagi sebuah negara yang melakukan diplomasi yaitu:

#### 1. Informasi

Diplomasi multilateral merupakan mekanisme paling efektif dalam penyebaran informasi. Informasi adalah cara yang paling menentukan bagi seseorang untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan dan mereka lakukan, termasuk orang-orang yang ada dalam pemerintahan. Informasi yang dimaksud adalah proses sosialisasi yang dilakukan oleh suatu pemerintah untuk memberitahu publik atau dunia internasional.

## 2. Perjanjian Multilateral

Perjanjian multilateral adalah komitmen timbal balik di mana masing-masing pihak berusaha untuk melakukan tindakan tertentu dalam kesepakatan yang telah ditetapkan. Perjanjian multilateral berupa upaya untuk berperilaku sesuai dengan cara yang telah ditetapkan, dan kontrak dalam diplomasi multilateral adalah usaha timbal balik antara semua pihak di mana masing-masing pihak akan melakukan kewajibannya. Perjanjian internasional bersifat *self-fulfilling* yaitu selama satu pihak melihat adanya manfaat pada pihak lain.

## 3. Negosiasi

Negosiasi merupakan sebuah proses di mana berbagai pihak melakukan interaksi yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pihak lain dalam sebuah pertemuan. Dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam diplomasi multilateral mempertemukan antara negara dengan negara ataupun dengan organisasi untuk memutuskan suatu permasalahan yang penting.

Secara umum negosiasi diartikan sebagai sebuah proses di mana tawaran secara jelas disampaikan untuk tujuan mencapai kesepakatan tentang pertukaran atau realisasi terhadap kepentingan yang sama di mana konflik kepentingan muncul. Unsur-unsur yang mengawali sebuah negosiasi adalah kepentingan bersama (*common interest*) dan masalah yang dipertentangkan (*issues of conflict*).

## 4. Delegasi

Delegasi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang diutus oleh pemerintah untuk mewakili negaranya dalam menyampaikan kepentingan negaranya.

Kesepakatan yang dihasilkan dalam sebuah diplomasi multilateral dapat dicapai melalui dua cara, yaitu melalui konsensus dan melalui suara terbanyak (*voting*). Konsensus

merupakan kesepakatan yang diambil jika semua pihak menyetujui sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat. Namun apabila konsensus tidak berhasil maka dilanjutkan dengan *voting*. *Voting* merupakan kesepakatan yang diambil melalui suara terbanyak terhadap suatu kesepakatan (Walker, 2004).

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba melihat melalui kacamata teori diplomasi multilateral untuk menganalisis tindakan-tindakan Vanuatu di forum-forum internasional terkait dukungannya terhadap kemerdekaan Papua Barat. Selain itu, akan dibahas pula bagaimana Vanuatu membuat kesepakatan untuk bekerjasama, mempengaruhi negara lain agar ikut mendukung kemerdekaan Papua Barat, mewujudkan hubungan yang bermanfaat di antara negara-negara yang berkonferensi, mendorong agenda domestik negara mereka dengan negara lain, mendorong sifat reaktif negara lain agar mau mendukung kemerdekaan Papua Barat, dan mendorong terjadinya sebuah rutinitas terkait dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat.

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teoretik yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil hipotesis bahwa upaya Vanuatu dalam mendukung kemerdekaan Papua Barat dilakukan dengan menggunakan jalur diplomasi multilateral, baik di level regional maupun di level internasional. Di level regional, pemerintah Vanuatu mendorong kemerdekaan Papua Barat melalui Melanesian Spearhead Group (MSG), dan Pacific Island Forum (PIF) dan di level internasional melalui konferensi-konferensi yang dilakukan dengan negara-negara lain maupun dengan PBB.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menemukan sejumlah karya tulis ilmiah yang ditulis oleh penulis terdahulu lainnya yang membahas hubungan Vanuatu dan Papua Barat.

Tulisan ilmiah pertama yang digunakan adalah skripsi yang berjudul “Kepentingan Vanuatu dalam Usaha Pemerdekaan Papua” oleh Thomas Bagus Putra Temaluru, yang diterbitkan tahun 2016. Skripsi ini menggunakan konsep *small state diplomacy* dalam upaya menjelaskan mengapa Vanuatu menjadi negara yang paling vokal dalam membicarakan isu Papua Barat di ranah internasional. Nilai-nilai lokal yang diterapkan dalam domestik politik negara Vanuatu berperan besar dalam membentuk karakteristik kebijakan luar negeri Vanuatu. Nilai tersebut tertanam dari generasi ke generasi, terbukti dari konsistensi Vanuatu dalam mendukung kemerdekaan Papua Barat. Skripsi ini juga membahas upaya yang dilakukan Vanuatu untuk mendukung kemerdekaan Papua di 3 masa pemerintahan yang berbeda, yakni Moana Carcasses Kalosil (2013-14), Joe Natuman (2014-15) dan Sato Kilman (2015-16). (Temaluru, 2016)

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah obyek yang diteliti sama-sama Vanuatu dan Papua Barat. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan, dan kurun waktu penelitian yang menjadi fokus kajian. Skripsi tersebut memiliki jangkauan waktu penelitian mulai dari tahun 2013-2015, sedangkan penelitian ini berfokus pada masa setelahnya, yakni 2016-2020.

Yang kedua, penulis menggunakan artikel jurnal yang berjudul “Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Separatisme Papua” oleh Ahmad Sabir, yang diterbitkan pada tahun 2018. Dalam artikel jurnal ini dijelaskan bagaimana Indonesia menggunakan diplomasi publik dalam upaya meredam dan menyelesaikan masalah separatisme di Papua Barat. Dibahas secara singkat pula tentang sejarah bagaimana munculnya separatisme di Papua Barat. (Sabir, 2018)

Persamaan artikel jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah obyek yang diteliti, yakni Vanuatu dan Papua Barat. Perbedaan artikel jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, dan fokus penelitiannya. Teori yang digunakan oleh

penulis artikel jurnal tersebut adalah diplomasi publik dengan fokus perhatian lebih kepada pihak Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan teori diplomasi multilateral.

Tulisan ilmiah ketiga yang digunakan adalah skripsi yang berjudul “Peran Melanesian Spearhead Group dalam Internasionalisasi Papua Merdeka” oleh Muhammad Kemal Daffa, yang diterbitkan tahun 2020. Skripsi ini menggunakan konsep Organisasi Internasional dan Politik Identitas dalam membahas bagaimana Melanesian Spearhead Group berupaya melakukan internasionalisasi terhadap isu Papua Merdeka. (Daffa, 2020)

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang fenomena Papua Barat. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori dan fokus penelitiannya. Skripsi ini lebih berfokus pada MSG di level regional sebagai *International Governance Organization* dan negara-negara anggotanya secara umum, sedangkan penulis lebih berfokus ke level negara, yakni Vanuatu.

Tulisan-tulisan di atas sudah cukup banyak menyinggung soal Vanuatu dan isu yang terjadi di Papua Barat. Namun pembahasan-pembahasan tersebut belum menyentuh suatu segmen khusus yang membicarakan bagaimana upaya Vanuatu dalam mendukung kemerdekaan Papua Barat di tahun 2016-2020, di masa pemerintahan Perdana Menteri Charlot Salwai.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menjelaskan kondisi aktual dan dianalisis secara terfokus dan mendalam terkait dengan permasalahan penelitian yang diajukan. Jenis data pada penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan literatur, buku dan *online research* yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bentuk data yang dikumpulkan dalam studi

pustaka ini adalah literatur mengenai dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua Barat. Literatur tersebut bisa berbentuk buku, jurnal, artikel, berita dan website resmi.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada periode Charlot Salwai menjabat sebagai Perdana Menteri Vanuatu, yakni pada tahun 2016-2020. Hal ini penulis lakukan agar penelitian ini bisa lebih fokus dan mendalam. Selain itu, periode tersebut adalah waktu dimana pemerintah Vanuatu menunjukkan kembali dukungannya yang kuat terhadap isu kemerdekaan Papua Barat. Penulis memfokuskan pokok bahasan pada strategi dan upaya yang digunakan pemerintah Vanuatu dalam mendukung kemerdekaan Papua Barat, serta bagaimana masyarakat internasional menanggapi dukungan tersebut.

## **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan pada penelitian ini dapat dibagi sebagai berikut:

**BAB 1 :** Pada bab ini penulis akan menjabarkan pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan Teoritis, Hipotesis, Metode Penelitian, *Literature Review*, Ruang Lingkup Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

**BAB 2 :** Pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang Vanuatu dan hubungannya dengan Papua Barat dan Indonesia.

- A. Hubungan Vanuatu dengan Papua Barat
- B. Hubungan Vanuatu dengan Indonesia

**BAB 3 :** Pada bab ini penulis akan menjelaskan upaya yang dilakukan Vanuatu dalam mendukung kemerdekaan Papua Barat.

- A. Upaya Diplomatik Vanuatu di Level Internasional
- B. Upaya Diplomatik Vanuatu di Level Regional
  - 1. Melanesian Spearhead Group (MSG)
  - 2. Pacific Island Forum (PIF)
- C. Respon Masyarakat Regional dan Internasional terhadap Upaya Vanuatu

D. Respon Indonesia terhadap Upaya Vanuatu

**BAB 4** : Pada bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan atas hasil yang didapatkan selama penelitian.